

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007).

Berdasarkan UU 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat 1 mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (pusat dan daerah) harus dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah berdampak terhadap kepentingan dan kebutuhan publik dan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik, oleh karena itu pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka pemerintah perlu melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yaitu pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan yang relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan sesuai dengan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan keuangan merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas dan merupakan salah satu alat ukur kinerja finansial pemerintah daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan pemerintah daerah maka akan berimplikasi terhadap peningkatan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu laporan keuangan tersebut juga perlu dilengkapi dengan pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan..

Pemerintah Kabupaten Kupang merupakan entitas pelaporan yang menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Akan tetapi dalam kenyataannya sampai dengan tahun anggaran 2013, Pemerintah Kabupaten Kupang masih berpedoman pada PP Nomor 24 tahun 2005 dengan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)

yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang berasumsi bahwa :

- a. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang merupakan organisasi yang mandiri dan menjadi pusat pertanggungjawaban yang harus bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebagai entitas pelaporan
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang akan berlanjut keberadaannya atau berkesinambungan
- c. Setiap transaksi atau kejadian yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dinilai dengan satuan uang

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan asset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Pelaporan keuangan ini disusun secara double entries atas seluruh pendapatan atau penerimaan dan belanja atau pengeluaran yang terjadi dalam satu tahun anggaran.

Secara umum capaian target dan realisasi APBD/perubahan APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2011 dan 2012 digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Capaian target dan realisasi APBD tahun 2011

NO.	Uraian	APBD	Realisasi APBD
1.	Pendapatan	605.008.354.100,22	601.859.937.132,93
2.	Belanja	777.783.380.647,00	671.373.439.791,50
3.	Surplus/(defisit)	(172.775.026.546,78)	(69.513.502.658,57)
4.	Penerimaan Pembiayaan	177.775.026.546,78	177.637.950.946,78
5.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.	Pembiayaan Netto	172.775.026.546,78	174.637.950.946,78
7.	SiLPA	-	105.124.448.288,21

Sumber: LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2011

Dari tabel 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan pada tahun 2011 dianggarkan sebesar Rp 605.008.354.100,22 dan direalisasikan sebesar Rp 601.859.937.132,93 sedangkan belanja dianggarkan sebesar Rp 777.783.380.847,00 dan direalisasikan sebesar Rp 671.373.439.791,50. Terjadi defisit sebesar Rp (69.518.353.658,57) yang merupakan perbandingan antara total realisasi pendapatan dikurangi total realisasi belanja. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 177.775.026.546,78 dan direalisasikan sebesar Rp 177.637.950.946,78 sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 5.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 3.000.000.000,00. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama periode pelaporan sebesar Rp 174.637.950.946,78 yang selanjutnya disebut dengan pembiayaan netto. SiLPA TA 2011 sebesar Rp 105.124.448.288,21. Jumlah tersebut berasal dari defisit ditambah pembiayaan netto.

Tabel 1.2 Capaian Target dan Realisasi APBD tahun 2012

NO.	Uraian	APBD	Realisasi APBD
1.	Pendapatan	643.745.706.721,00	679.669.480.719,00
2.	Belanja	769.983.638.509,00	691.319.530.872,10
3.	Surplus/(defisit)	(126.237.931.788,00)	(11.650.050.152,41)
4.	Penerimaan Pembiayaan	133.237.931.788,00	105.925.303.788,21
5.	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	1.890.240.000,00
6.	Pembiayaan Netto	126.237.931.788,00	104.035.063.788,21
7.	SiLPA	-	92.385.013,635,80

Sumber: LKPD Kabupaten Kupang Tahun 2012

Dari tabel 1.2 diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp 643.745.706.721,00 dan direalisasikan sebesar Rp 679.669.480.719,00 sedangkan belanja dianggarkan sebesar Rp 769.983.638.509,00 dan direalisasikan sebesar Rp 691.319.530.872,10. Terjadi defisit sebesar Rp (11.650.050.152,41) yang merupakan perbandingan antara total realisasi pendapatan dikurangi total realisasi belanja. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 133.237.931.788,00 dan direalisasikan sebesar Rp 105.925.303.788,21 sedangkan pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 7.000.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp 1.890.240.000,00. Selisih lebih/(kurang) antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama periode pelaporan sebesar Rp 104.035.063.788,21 yang selanjutnya disebut dengan pembiayaan netto. SiLPA TA 2012 sebesar Rp 92.385.013,635,80. Jumlah tersebut berasal dari defisit ditambah pembiayaan netto.

Laporan audit yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur memberikan opini disclaimer atau tidak berpendapat terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang selama 5 tahun terakhir yaitu sejak tahun 2008-2012.

Beberapa faktor penyebab belum diperolehnya opini disclaimer dari BPK yakni lemahnya sistem pengendalian intern, dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada maka BPK menyarankan Pemerintah untuk melakukan perbaikan sistemik agar tidak terjadi temuan berulang, yaitu antara lain:

- a. Meningkatkan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang berbasis komputer untuk penyusunan dan pelaporan LKPD secara terintegrasi serta sekaligus mendukung penerapan e-audit;
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM
- c. Mendorong dan membangun penerapan *Fraud Control System* (Sistem Kendali Kecurangan) di setiap SKPD;

Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Daerah kabupaten Kupang sebagai suatu entitas pelaporan masih mengalami kesulitan untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas. Pemerintah belum sepenuhnya mampu sehingga masih mengalami kendala-kendala yang

menyebabkan penyajian laporan keuangan tidak berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Kendala-kendala yang dihadapi adalah terlambatnya laporan keuangan dari SKPD-SKPD, keterbatasan sumber daya manusia untuk mampu mengikuti peraturan yang menjadi pedoman, serta keterbatasan jumlah dan kualitas perangkat yang tersedia untuk dapat digunakan.

Beberapa peneliti terdahulu seperti Sande (2012) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Propinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Serta Bandariy (2011) dengan judul Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan dan Aksesibilitas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jepara yang juga mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Mengingat begitu signifikannya pengaruh yang diberikan maka sudah seharusnya kalau pemerintah harus berusaha untuk menyajikan laporan keuangan yang lengkap.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menguji kembali hasil penelitian beberapa peneliti terdahulu yang telah disebutkan dengan melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kupang Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah”**.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh positif dan signifikan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Kabupaten Kupang menyajikan suatu laporan keuangan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat yaitu :

1. Bagi penulis yaitu untuk menambah pengetahuan mengenai penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,
2. Bagi pemerintah kabupaten Kupang yaitu sebagai referensi dalam hal

penyajian laporan keuangan dalam rangka peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,

3. Bagi pihak lain yaitu sebagai bahan masukan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik lagi mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.